



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2024

BAPPEDA KAB MUNA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Izin dan Rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024**. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Bappeda. Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang sejahtera dan lebih baik.

Laworo, Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Muna Barat



R. DIAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 196608041990031012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	14
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB V PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Hal.
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d tahun 2022 Kabupaten Muna Barat	6
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat.....	9
2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat.....	13
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Bappeda tahun 2024.....	15
4.1	Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.....	17
4.2	Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna barat.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bappeda Kabupaten Muna Barat merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, sebagaimana mana ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sehingga menjadi suatu kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Muna Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Muna Barat. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RPD Tahun 2023-2026, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD 2021 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (RPD) 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Bappeda Kabupaten Muna Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda yaitu:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024; dan
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi, yang terdiri dari : (1) evaluasi kebijakan perencanaan program dan kegiatan; (2) evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan; dan (3) evaluasi hasil rencana program dan kegiatan. Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d tahun 2023 Kabupaten Muna Barat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (%)	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5,510,949,900	5.717.177.235	5.135.805.373	89,83		
5	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	4,196,069,650	3.684.787.945	3.287.305.550	89,21	100	100
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	CC	232,242,000	22.998.230	20.371.000	88,58	CC	B
5	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Keuangan OPD Yang Disampaikan Tepat Waktu	100	1,417,739,828	1.111.301.850	1.067.182.298	96,03	100	100
5	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	100	5,000,000	2.999.870	2.999.000	99,97	100	100
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	100	369,108,000	205.899.800	124.379.500	60,41	100	100
5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pendidikan	100	1,285,245,462	930.854.485	893.272.597	95,96	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (%)	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%)
5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	563,746,000	1.007.912.300	863.265.000	85,65	100	100
5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	100	259,200,000	255.561.320	199.231.250	77,96	100	100
5	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	63,788,360	147.260.190	116.604.905	79,18	100	100
5	1	2		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	814,685,400	1.116.099.150	1.060.008.703	94,97	100	100
5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100	494,709,400	543.797.075	535.152.903	98,41	100	100
5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	165,000,000	318.758.025	290.834.500	91,24	100	100
5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	154,976,000	253.544.050	234.021.300	92,3	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (%)	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%)
				Perencanaan Pembangunan Daerah								
5	1	2	2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terimplementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100	-	-	-	-	-	-
5	1	3		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD	100	500,194,850	507.328.400	489.746.520	96,53	100	100
5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	188,198,800	156.274.550	150.502.120	96,31	100	100
5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	155,997,900	164.163.230	158.664.900	96,65	100	100
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	155,998,150	186.890.620	180.579.500	96,62	100	100
5	5	2		Program penelitian dan pengembangan daerah	% Hasil-hasil Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah	100	345,000,000	408.961.740	298.744.600	73,05	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (%)	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi Targer Capaian Program & Kegiatan (%)
5	5	2	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	-	108.961.990	0	0	0	0
5	5	2	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan dibidang Sosial dan Kependudukan	100	-	-	-	-	-	-
5	5	2	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Ekonomi dan Pembangunan	100	449.999.700	449.999.700	447.901.200	99,53	100	100
5	5	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD yang melakukan inovasi dan Teknologi	50	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sampai dengan tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)		Proyeksi Tahun Ke- (%)	
			2020	2021	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-4	-9	-10	-15	-16	-21	-22
1. Penunjang Urusan Perencanaan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	80	100	80	100
Penelitian dan pengembangan								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	75%	73%	75%	73	75	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	75%	73%	75%	73	75	100	100
3	Penerapan SIDA:							
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	75%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	75%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, permasalahan kedepannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan jangkauan kegiatan dalam kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas. Permasalahan-permasalahan yang

muncul pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat yang optimal. Perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 maupun isu-isu strategis terkini yang harus ditangani secara baik. Adapun Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain:

1. Konsep Money Follow Program

Saat ini penganggaran menggunakan pendekatan Money Follow Function. Artinya dalam penyusunan anggaran, fungsi menjadi poros utama dalam alokasi anggaran. Hal ini dinilai menciptakan beberapa pemborosan dimana terdapat beberapa fungsi dalam pemerintahan yang tidak prioritas tetap mendapat alokasi anggaran. Skala Prioritas menjadi kabur dimana setiap lembaga pemerintahan mengajukan anggaran dan sulit untuk dilakukan filter karena argument dasarnya dalam alokasi anggaran adalah fungsi.

Pengalaman empiris itu selanjutnya dievaluasi dan membuahkan pendekatan penganggaran dengan prinsip “Money Follow Program”. Pendekatan “Money Follow Program” harus dipahami sebagai alokasi anggaran berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan.

Pada penyusunan APBD yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berencana menggunakan pendekatan konsep Money Follow Program. Tentunya perubahan pendekatan harus pula dibarengi perubahan mind set penganggaran. Jika sebelumnya (menggunakan pendekatan “Money Follow Function”), filter pengalokasian anggaran adalah fungsi, Prioritas menjadi kata kunci utama dalam penganggaran “Money Follow Program”. Sehingga ke depan penganggaran lebih focus pada program dan kegiatan yang akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

2. Pengalihan urusan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014

Tercapainya pemahaman dan persepsi yang sama pada tataran Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UU 23 Tahun 2014, dimana konsekuensi perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, yang akan berdampak pada peralihan penanganan pada beberapa sub-urusan.

3. Sinkronisasi terhadap visi misi kepala daerah terpilih

Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih melalui tujuan-sasaran-strategi-kebijakan-program-kegiatan.

4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

Hal ini dapat terlihat dari Minimnya sarana dan prasana perangkat daerah dalam mendukung tugas-tugas aparatur perencana dan minimnya jumlah aparatur perencana yang memiliki kompetensi.

5. Lemahnya pengawasan kelembagaan internal dan minimnya kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Hal ini dapat terlihat dari belum optimalnya ketersediaan data/informasi tentang pembangunan daerah yang up to date, belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah, Minimnya kuantitas dan kualitas SDM ASN yang memiliki kompetensi perencanaan pembangunan, dan belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah

Hal ini diakibatkan karena belum adanya Rencana Induk Kelitbangan Daerah, dan belum optimalnya pengembangan sistem inovasi daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 yang terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Penyusunan RKPD ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPD dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara. RKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2024 menjadi satu-satunya bahan rujukan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 adalah:

a. RPJMN

Penyusunan Renja Bappeda mengacu pada Renstra Bappeda dan RPD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja kunci yang perlu direncanakan dan dilaksanakan per tahunnya.

b. Rencana Kerja Pemerintah

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

c. Komitmen Nasional

Upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui percepatan 8 (delapan) tujuan (goals) yang mencakup:

- 1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan;
- 2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua;
- 3) Mendorong Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Menurunkan Angka Kematian Anak;
- 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
- 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
- 8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

d. RTRW

Perlunya perencanaan berpedoman pada aspek ruang dan lokasi karena aspek tersebut mengarahkan seluruh dinamika pemangku kepentingan terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan. Semua aspek keruangan pada dokumen perencanaan termasuk Renja harus berpedoman pada RTRW.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, maka Tujuan dan sasaran Renja Bappeda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah		Nilai SAKIP Kabupaten	CC	CC	CC	CC	B
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	95	100	100	100	100
			Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	B	B	B	BB	BB
			Pemanfaatan Hasil-Hasil Litbang dan Inovasi Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	75	80	90	95	100

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Bappeda Kabupaten Muna Barat mempunyai 4 program dan 18 kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan

kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Muna Barat yaitu:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

c. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

d. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat seperti pada Tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencana Pembangunan Daerah dan Hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan
		2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	2. Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3. Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD
		4. Program penelitian dan pengembangan daerah	4. % Hasil-hasil Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah
			5. Jumlah Inovasi Daerah yang diterapkan

Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1				PERENCANAAN			6.553.235.382
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	4.221.604.882
5	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	17.500.000
5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000
5	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000
5	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000
5	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.500.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000
5	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.500.000
5	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.500.000
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan OPD yang tepat waktu	100%	2.746.553.382
5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	2.734.053.382
5	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2.500.000
5	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.500.000
5	1	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.500.000
5	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.500.000
5	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	100%	2.500.000
5	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	2.500.000
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung administrasi umum perangkat daerah	100%	887.085.830
5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000
5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.484.000
5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	23.727.100

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3.600.000
5	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	36.306.730
5	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	3.000.000
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	797.968.000
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	100%	276.995.670
5	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	995.670
5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000
5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	264.000.000
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	290.970.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	270.970.000
5	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	1				PERENCANAAN			
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.171.897.500
5	1	2	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan yang selaras dan tepat waktu	100%	1.335.911.500
5	1	2	02.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	39.583.500
5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	24.994.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	62.249.000
5	1	2	02.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	22 Usulan	31.498.500
5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1.177.586.500
5	1	2	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	66.404.000
5	1	2	02.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	50 Buku	66.404.000
5	1	2	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	14.958.000
5	1	2	02.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	14.958.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	2	02.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	754.624.000
5	1	2	02.04	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	754.624.000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD	100%	159.733.000
5	1	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	61.878.000
5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2 Dokumen	29.904.000
5	1	3	02.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	1.035.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	29.904.000,
5	1	3	02.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	1.035.000
5	1	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	49.445.000
5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	29.904.000,
5	1	3	02.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	1.035.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	17.471.000
5	1	3	02.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	1.035.000
5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	48.410.000
5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	29.904.000
5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	17.471.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024	
							TARGET	JUMLAH DANA (Rp)
5	1	3	02.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	11 Perangkat Daerah	1.035.000
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Hasil-hasil Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah	100%	54.862.000
						Jumlah Inovasi Daerah yang diterapkan		
5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD yang melakukan inovasi dan Teknologi	50 %	54.862.000
5	5	2	02.04	4	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	54.862.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renja telah selaras dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (RPD) Tahun 2023-2026, dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2024 ini dapat diimplementasikan secara akuntabel dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Muna Barat.

Laworo, Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muna Barat



R. DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 196608041990031012